

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan ini menjelaskan bagaimana IOM sebagai organisasi internasional dalam mengatasi kasus perdagangan manusia yang ada di Vietnam yang di pandang sebagai suatu ancaman keamanan yang bersifat Non-tradisional. Dalam kasus perdagangan manusia, yang menjadi ancaman adalah keselamatan dan keamanan manusia itu sendiri. Rumusan masalah yang penulis jawab dalam skripsi ini adalah mengapa keberadaan IOM belum optimal dalam mengatasi isu terkait perdagangan manusia yang ada di Vietnam, sedangkan organisasi tersebut sudah ada cukup lama.

Dalam skripsi ini penulis menemukan beberapa hambatan yang menjadi faktor penyebab IOM belum optimal dalam mengatasi perdagangan manusia di Vietnam. Hambatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu penyebab internal dan eksternal. Penyebab internal seperti terbatasnya anggaran dari IOM untuk mengatasi isu perdagangan manusia. Selain itu, ketidakstabilan politik juga menjadi salah satu penyebab penghambat IOM dalam mengatasi isu perdagangan manusia.

Sedangkan penyebab eksternal IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Vietnam adalah diskriminasi gender, kemiskinan, rendahnya kesadaran terhadap perdagangan manusia, dan lemahnya kapabilitas aparat hukum yang ada di Vietnam menjadi hambatan IOM dalam mengatasi isu perdagangan manusia. Sebagai organisasi internasional IOM harus sesuai dengan keyakinan sosial masyarakat Vietnam agar dapat dianggap sah. Hal ini terkait dengan pandangan dan keyakinan aktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, IOM harus sesuai dengan keinginan Masyarakat agar IOM sebagai organisasi internasional bisa dianggap sah.

Namun pada kenyataannya pemerintah Vietnam belum mampu memberikan atau melaksanakan kebijakannya secara efektif. Hal ini terbukti dengan meningkatnya 739 korban perdagangan manusia pada tahun 2018 yang menjadikan Vietnam masuk 10 besar yang perempuannya ikut terlibat dalam kasus perdagangan manusia. Dalam praktiknya pemerintah Vietnam masih lalai dalam merealisasikan kebijakannya. Tidak banyak korban perdagangan manusia yang mendapatkan perlindungan yang layak secara undang-undang dan kebijakan pemerintah Vietnam dinilai masih kurang dalam menegakan keamanan dari ancaman kejahatan

lintas batas negara, sehingga hal ini menjadi penyebab masih tingginya kasus perdagangan manusia di Vietnam.

Dalam penelitian ini penulis menemukan riset lanjutan tentang bagaimana batasan-batasan kebijakan IOM dapat mempengaruhi sistem pemerintahan Vietnam dalam mengatasi isu terkait perdagangan manusia. Sedangkan otonomi IOM sebagai sebuah organisasi internasional dibatasi.

